

# BAB I

## PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIMED

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan, bahwa daerah-daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi, teknologi, informasi dan inovasi telah menjadi bagian dari sistem kota-kota besar dari adanya jaringan transportasi dan komunikasi yang sangat maju dan adanya sistem produksi barang dan jasa yang terspesialisasi namun terkait satu sama lain. Fenomena ini di satu pihak sangat menggembirakan karena daerah perkotaan mempunyai peluang untuk terus meningkatkan kegiatannya dalam pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dan bangsa bersama pemerintah untuk mengubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi dengan cara melakukan proses pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha-usaha perbaikan mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan daya dukung lingkungan tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya mutu hidup yang akan dicapai melainkan justru kemerosotan hidup yang didapat.

Pembangunan akan membawa dampak bagi kehidupan manusia baik dampak yang bersifat positif maupun dampak negatif. Dampak positif pembangunan adalah adanya peningkatan pendidikan, peningkatan penghasilan, peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup. Sedangkan dampak negatif pembangunan adalah adanya penurunan

kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat berupa kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, apakah itu pencemaran lingkungan udara, air dan tanah. Di samping itu pembangunan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup di kota. Sering dijumpai suatu kota yang jorok, sampah-sampah berserakan dan pemukiman-pemukiman kumuh. Semuanya ini merupakan dampak negatif pembangunan yang tentunya tidak diharapkan oleh manusia. (Amsyari, 1995 : 48)

Banyaknya permasalahan di kota disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk pencemaran lingkungan. Sering kali sebagian anggota masyarakat melakukan hal-hal yang kurang terpuji sehingga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Masih Banyak anggota masyarakat kota yang masih membuang sampah di jalan-jalan, membuang tinja ke sungai-sungai dan lain sebagainya. Sikap dan prilaku seperti ini akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih.

Permasalahan lingkungan hidup di kota dapat juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat. Kemiskinan di daerah perkotaan menimbulkan dampak buruk terhadap sanitasi rumah tangga, timbulnya berbagai macam penyakit, serta dampak negatif lainnya yang berkembang di daerah pemukiman kumuh. Kualitas rumah yang tidak memenuhi syarat akan berpengaruh terhadap kesehatan penghuninya. Demikian juga ketersediaan air minum yang kurang bersih dan sistem pembuangan kotoran di dalam rumah tentu saja dapat menimbulkan masalah lingkungan yang lebih luas.

Di samping faktor-faktor pendidikan dan rendahnya pendapatan masalah lingkungan dapat juga disebabkan oleh rendahnya pelayanan sarana dan prasarana kota.

Selain itu, kemampuan pemerintah kota dalam hal manajemen maupun pembiayaan sangat terbatas. Demikian juga halnya dengan perangkat lunak, seperti peraturan perundang-undangan misalnya yang mengatur kegiatan pembangunan kota masih belum dapat mengikuti dinamika perkembangan daerah perkotaan. (Budihardjo, 1997 : 21)

Melihat kecenderungan perkembangan dan tantangan pembangunan daerah-daerah perkotaan dimasa yang akan datang, perlu diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah perlu meningkatkan dan memantapkan peran sertanya sebagai fasilitator untuk mendorong peran swasta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan sehingga mampu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan terkait dalam pengelolaan pembangunan sangat diperlukan partisipasi masyarakat.

Di dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dan peran yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Adanya partisipasi masyarakat tersebut mempunyai motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup, dan mengusahakan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mutu atau kualitas lingkungan dapat terwujud.

Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan dan kebersihan kota sangat diperlukan, sehingga budaya bersih tertanam dalam cara hidup seseorang dan masyarakat yang didasari oleh kesadaran terhadap nilai-nilai dengan memperhatikan

norma dan hukum adat yang dapat menunjang pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup. Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaharuan. Pembaharuan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baru pula.

Pembangunan dilakukan oleh manusia dan bertujuan untuk kesejahteraan manusia, maka peran terbesar dalam pelaksanaan maupun pencapaian tujuan akan tergantung kepada kualitas dan tanggung jawab manusia. Apalagi dalam peraturan perundang-undangan dewasa ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, dan hal ini juga merupakan sebagai pelaku dan pemantau pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah serta perubahan kualitas lingkungan yang ditimbulkan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup? Hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan hidup antara lain yaitu peranan pemerintah, peranan swasta, pendidikan, pendapatan, pemahaman lingkungan, kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat.

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, serta keterbatasan waktu dan biaya, maka perlu dibatasi permasalahan pada dua faktor yaitu

tingkat pendidikan dan pendapatan dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup?
2. Apakah terdapat hubungan yang positif antar tingkat pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup?
3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang :

1. Hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
2. Hubungan tingkat pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
3. Hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kisaran Barat tentang perlunya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan

2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Asahan dalam memperhitungkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat

